

# ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINA USAHA

## *ANALYSIS OF INHIBITING FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDES) BINA USAHA*

Surya Akbar<sup>1</sup>, Khaidir<sup>2</sup>, Supardi<sup>3</sup>, Monalisa<sup>4</sup>, Karto<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

E-mail: [akbarsurya25@gmail.com](mailto:akbarsurya25@gmail.com), [Khaidir@unrida.ac.id](mailto:Khaidir@unrida.ac.id), [Supardi@unrida.ac.id](mailto:Supardi@unrida.ac.id), [nonapawors123@gmail.com](mailto:nonapawors123@gmail.com), [karto@gmail.com](mailto:karto@gmail.com)

**Abstrak:** Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi terhadap pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penghambat perkembangan BUMDES Bina Usaha di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research/field study). Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Key informan berupa Kepala Desa, Direktur BUMDES, Kepala Unit Usaha, Bendahara dan Sekretaris. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa banyak yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan BUMDES Bina Usaha yakni tata kelola pengurus yang masih kurang memadai, kurangnya kerjasama dan komunikasi antara pengurus BUMDES dengan pemerintahan desa, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses usaha dan kualitas dan kuantitas SDM BUMDES belum memadai serta kurangnya pengawasan dari pemerintahan desa Sialang Dua Dahan. Adapun saran penelitian ini yaitu bagi pemerintahan desa harus memberikan pembinaan maupun pelatihan serta pengawasan yang maksimal terhadap pelaksana BUMDES Bina Usaha agar lebih mengenal potensi-potensi desa untuk meningkatkan program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Bagi pengelola BUMDES Bina Usaha perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan BUMDES agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana yang dilaksanakan oleh BUMDES Bina Usaha.

**Kata Kunci:** *Penghambat, Perkembangan BUMDES, Partisipasi*

**Abstract:** *The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDES) is one way to utilize the law granting authority to village governments to innovate in village development, particularly in improving the village economy and the welfare of village communities. This study aims to identify the inhibiting factors affecting the development of BUMDES "Bina Usaha" in Sialang Dua Dahan Village, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency. This research employs a qualitative approach (field research/field study). The sampling technique used is purposive sampling. Key informants include the Village Head, BUMDES Director, Business Unit Head, Treasurer, and Secretary. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that several factors hinder the development of BUMDES Bina Usaha, including inadequate governance by its administrators, insufficient cooperation and communication between BUMDES managers and the village government, weak community participation in supporting business processes, inadequate quality and quantity of BUMDES human resources, and a lack of supervision from the Sialang Dua Dahan village government. The study suggests that the village government should provide coaching, training, and maximum supervision to BUMDES Bina Usaha administrators so they can better recognize the village's potential to improve programs for community economic empowerment and enhance the local economy. Meanwhile, BUMDES Bina Usaha managers are advised to conduct more in-depth outreach about the existence of BUMDES so that the community can be aware of and understand the plans being implemented by BUMDES Bina Usaha.*

**Keywords:** *Inhibiting Factors, BUMDES Development, Participation*

## PENDAHULUAN

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan pemberian Dana Desa yang bersumber dari APBN. Keuntungan dari adanya Dana Desa ini yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa. Desa dapat berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan, dan pemberdayaan desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Dibalik keuntungan pemberian Dana Desa yang begitu besar saat ini dengan tujuan untuk percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia, dikhawatirkan dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya kebijakan Dana Desa ini akan meningkatkan ketergantungan pemerintah desa dalam hal kemandirian keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan desa kurang produktif dalam memanfaatkan potensi dan aset desa yang dimiliki. Pada era otonomi desa sekarang ini, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Desa dapat menggali potensi-potensi desa yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Desa dapat menggali potensi-potensi desa yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mendorong perekonomian desa yang mandiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 maka pemerintah membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pembentukan BUMDES

merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes No. 19 Bab III pasal 4 (ayat 1-5) Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDES atau BUMDES bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Menurut Majid Karim Pane, (2021) Badan usaha milik desa merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola hasil dari sumber yang ada di desa tersebut guna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat untuk lebih maju kedepannya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Dengan demikian, BUMDES merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

Pembentukan BUMDES merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi terhadap pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. Pembentukan BUMDES dilakukan untuk membangun daerah

pedesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan BUMDES menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDES. Melalui pengembangan potensi desa yang disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDES maka akan mendorong perekonomian desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa.

BUMDES Bina Usaha Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu melakukan unit usaha seperti Usaha Isi Ulang Air Minum, Pangkalan Gas LPG 3 Kilo dan Penyewaan Alat Pertanian (Traktoar Pertanian). Untuk melihat data pendapatan sebagai berikut :

Tabel 1. Pendapatan BUMDES Bina Usaha

No	Jenis Usaha	2021	2022
1	Gas LPG	Rp.20.000.0 00	Rp.15.000.0 00
2	Air Isi Ulang	Rp.10.000.0 00	Rp. 7.000.000
3	Sewa Trakt or	Rp. 8.000.000	Rp. 5.000.000
	Jumlah	Rp. 38.000.000	Rp. 27.000.000

Sumber : BUMDES, Data diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan BUMDES Bina Usaha mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar Rp. 11.000.000. Hal ini bisa diindikasikan bahwa pengelolaan unit usaha belum dijalankan secara maksimal serta kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan unit usaha BUMDES baik untuk penyewaan alat pertanian atau menggunakan air isi ulang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Menurut Saepudin dkk, (2018) Keberadaan BUMDES diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengelola program. Tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dapat dikategorikan positif artinya partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif. Peran aktif masyarakat sebagai modal utama dalam mengembangkan usaha. Keberadaan BUMDES akan mampu mencapai tujuan sebagai bagian dalam pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sasaran program berorientasi pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan rendah.

Perkembangan BUMDES yang baik diperlu kerjasama antara pengurus dengan pemerintahan desa untuk mengali potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan BUMDES menurut Sutoro Eko dalam Prasetyo, C. A., Kustiawan, & Nazaki (2021) Perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat sampai saat ini masih menghadapi banyak sekali kendala. Berikut ini beberapa faktor yang menghambat perkembangan yaitu:

1) Kepemimpinan Manajerial dan Tata Kelola (KMT). Merupakan faktor utama dalam menentukan hambatan perkembangan. Jika kepemimpinan manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka BUMDES akan mengalami kemerosotan yang lumayan tajam. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat Sumber Daya Manusia, semakin berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) maka tata kelola akan semakin baik. Kemampuan manajerial SDM BUMDES memiliki kaitan dengan perkembangan usaha BUMDES dalam hal merencanakan usaha dan program BUMDES, mengorganisasikan pengurus BUMDES, mengendalikan pengurus BUMDES yang lainnya serta mengevaluasi kegiatan BUMDES dalam hal administrasi dan keuangan.

2) Skala dan Jangkauan Badan Usaha. Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan bisnis eksternal seperti produksi dan distribusi hasil pertanian keluar Desa, umumnya rentan dan mudah gulung tikar dikarenakan skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang sangat terbatas. Keterbatasan dalam menjalankan BUMDES yang hanya berskala lokal seringkali menyebabkan terhambatnya BUMDES dalam memberdayakan dan mengembangkan unit usaha sehingga semakin lama BUMDES akan semakin tertinggal oleh keadaan masyarakat yang terus berkembang.

3) Emansipasi Lokal. Badan Usaha Milik Desa yang tumbuh dari emansipasi lokal (persamaan derajat secara lokal) jauh lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan dengan Badan Usaha yang lahir dari pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Desa yang lahir karena pemerintah daerah umumnya berjalan tidak sesuai angan-angan. Pandangan dari masyarakat sekitar adalah bahwa BUMDES adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek lain yang masuk ke Desa. Sehingga kepercayaan dan daya lekat BUMDES kepada msyarakat sangat lemah. Pandangan dan kepercayaan masyarakat yang lemah terhadap BUMDES tersebut menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam meramaikan BUMDES ataupun bertransaksi dengan BUMDES. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat pada setiap organisasi usaha milik desa terkait besaran transaksi masyarakat terhadap BUMDES.

4) Kerjasama. Kerjasama yang dimaksudkan adalah kerjasama yang sifatnya internal dan eksternal. Artinya BUMDES harus bekerjasama baik di dalam sesama pengurus atau pihak luar (eksternal) yang akan mendukung kemajuan BUMDES seperti pemerintah desa dan BUMDES desa lainnya yang lebih maju.

5) Tradisi Berdesa. Dengan tidak adanya tradisi berdesa seperti tidak adanya tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong akan menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa. Tradisi berdesa yang selama ini melekat di masyarakat desa seperti yang telah disebutkan di atas sering ditinggalkan karena arus globalisasi yang menyebabkan hambatan akan perkembangan BUMDES semakin besar.

Kemudian didukung oleh hasil penelitian menurut Roni jaya dan Muhammad Rafi (2018) menjelaskan bahwa hambatan dalam pengembangan BUMDES Rempak Maju jaya diantaranya adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha

sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUM Desa. Selanjutnya adalah Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi diseputaran elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUMDES, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas.

Selanjutnya menurut Veni Angaraini (2021) faktor penghambat pengembangan koperasi syariah adalah tidak adanya pendisiplinan terhadap koperasi syariah yang ada dan tidak ada melakukan RAT, tidak melakukan strategi internal koperasi untuk pengembangan skill, pengetahuan, kebiasaan, serta kemampuan para anggota sesuai dengan prinsip koperasi syariah yang ada, hal ini juga menjadikan banyak koperasi syariah tidak aktif.

Namun, dalam kenyataan yang ditemukan dilapangan, perjalanan panjang hadirnya kelembagaan BUMDES di desa-desa di Indonesia sejak diperkenalkan dan menjadi program pemerintah, ternyata belum mampu mewujudkan harapan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa. BUMDES masih diragukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa, dalam arti optimisme yang rendah bahkan terkesan tidak memiliki kepercayaan, termasuk dikalangan internal pemerintah. Masyarakat memiliki pesimisme bahwa BUMDES akan mampu tumbuh berkembang menjadi penggerak baru penguatan sosial ekonomi di desa. Keterhambatan ini juga terjadi pada BUMDES Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan seperti kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus BUMDES dan tata kelola BUMDES yang belum maksimal, sehingga penulis tertarik untuk menelaah permasalahan ini.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian langsung yang dialami oleh subjek penelitian adapun hal-hal yang nantinya akan diamati berupa Perbuatan, Perilaku serta Pandangan dari subjek penelitian kemudian nantinya akan dilakukan perbandingan terhadap fenomena tersebut dengan bahasa, teori atau konteks keilmuan yang telah ada sebelumnya.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (to describe), memahami (to understand), dan menjelaskan (to explain) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling (Sugiyono 2019). Key informan berupa Kepala Desa, Direktur BUMDES, Kepala Unit Usaha, Bendahara dan Sekretaris. Teknik analisis data berupa redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Faktor Penghambat Perkembangan BUMDES Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan**

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDES merupakan lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. BUMDES Bina Usaha merupakan lembaga yang

bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidaklah mudah dan memiliki berbagai hambatan yang menghambat perkembangan organisasi tersebut. Dalam hal ini BUMDES Bina Usaha mengalami hambatan perkembangan dan berdampak pada tidak berjalannya beberapa unit usaha yang terdapat pada BUMDES Bina Usaha serta tidak tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDES Bina Usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat kesesuaian terhadap teori mengenai indikator faktor penghambat BUMDES menurut Sutoro Eko dalam Prasetyo, C. A., Kustiawan, & Nazaki (2021) dijelaskan bahwa faktor penghambat BUMDES dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

1. Kepemimpinan, Manajerial, Tata Kelola (KMT)

Merupakan faktor utama dalam menentukan hambatan perkembangan. Jika kepemimpinan manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka BUMDES akan mengalami kemerosotan yang lumayan tajam. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat Sumber Daya Manusia, semakin berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) maka tata kelola akan semakin baik.

Kemampuan manajerial SDM BUMDES memiliki kaitan dengan perkembangan usaha BUMDES dalam hal merencanakan usaha dan program BUMDES, mengorganisasikan pengurus BUMDES, mengendalikan pengurus BUMDES yang lainnya serta mengevaluasi kegiatan BUMDES dalam hal administrasi dan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak mulai Kepala Desa, Direktur BUMDES, Sekretaris, Bendahara maupun Kepala Unit Usaha dapat disimpulkan bahwa kemampuan kepemimpinan, manajerial dan tata kelola BUMDES masih kurang baik dan maksimal.

Hasil wawancara dengan Ketua BUMDES menyampaikan kepada penulis terkait perkembangan BUMDES “BUMDES ini berdiri sejak tahun 2018 dan sejak saat itu berkembang menjadi beberapa unit usaha, namun yang saat ini masih berjalan hanya air minum isi ulang, dan gas LPG, dan unit usaha lain seperti penyewaan traktor tidak berjalan dikarenakan masyarakat sudah banyak yang punya traktor sendiri. setiap pertemuan di kantor desa sudah kami beritahu agar masyarakat mau untuk bertransaksi di unit usaha yang kami miliki, namun masyarakat masih kurang berpartisipasi,” (Wawancara Ketua BUMDES Bapak Hendra, 27 Oktober 2023)

Merujuk hasil wawancara tersebut bahwa sejatinya BUMDES Bina Usaha masih memiliki unit usaha berjalan yakni air minum isi ulang dan gas LPG namun ada beberapa unit usaha bagian tani seperti peminjaman traktor yang kurang berjalan dengan baik dikarenakan banyak masyarakat yang sudah memiliki traktor pribadi dalam mengelola pertaniannya.

Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat sering dilakukan saat acara pertemuan yang dilakukan oleh desa namun masyarakat masih memiliki kurang partisipasi dan dukungan dalam penjalanan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES.

Dalam kesempatan yang sama bendahara BUMDES Bina Usaha bapak Sutoyo menambahkan bahwa BUMDES Bina Usaha pada saat ini berada pada tahap tumbuh dan mengalami stagnansi serta belum berkembang seperti desa lainnya, selain itu pengurus juga kesulitan dalam membuat laporan keuangan sehingga beliau berharap adanya kerjasama dengan pemerintah desa agar menjangkau SDM yang mampu dalam menyelesaikan permasalahan administrasi tersebut.

Pengelolaan organisasi yang baik diperlukan kuantitas dan kualitas SDM yang mengatur organisasi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Eddie Sutirno (2011), orang yang tepat pada tempat yang tepat akan meningkatkan produktivitas

suatu organisasi dan mengurangi kesalahan dalam suatu pekerjaan atau aktivitas.

Selain dari pada itu Pengembangan SDM, sebagaimana diungkapkan Gary Dessler dan Yusuf S. Dalam Hasibuan (2017), memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan karyawan, organisasi dapat mencapai beberapa tujuan strategis, antara lain :

- a. Meningkatkan Produktivitas Karyawan yang terampil cenderung lebih produktif dan efisien dalam tugas-tugas mereka.
- b. Inovasi Keterampilan yang terus dikembangkan membantu dalam mendorong inovasi dan perubahan positif di organisasi.
- c. Peningkatan Kualitas Layanan SDM yang terlatih dengan baik mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan atau pengguna jasa.
- d. Pertahanan dan Motivasi Karyawan Program pengembangan SDM dapat meningkatkan tingkat retensi karyawan dan meningkatkan motivasi kerja.
- e. Kesiapan untuk Perubahan Karyawan yang terlatih dengan baik lebih siap menghadapi perubahan di pasar atau dalam organisasi mereka

Memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari orang-orang yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Menganut pengertian tersebut, kata manusia merujuk pada sumber daya manusia dan tenaga. Pemikiran ini berkaitan dengan kerangka pemikiran bahwa kualitas dan kekuatan sumber daya manusia harus ditingkatkan agar menjadi tangguh.

## 2. Skala dan Jangkauan Usaha

Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan bisnis eksternal seperti produksi dan distribusi hasil pertanian

keluar Desa, umumnya rentan dan mudah gulung tikar dikarenakan skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang sangat terbatas.

Keterbatasan dalam menjalankan BUMDES yang hanya berskala lokal seringkali menyebabkan terhambatnya BUMDES dalam memberdayakan dan mengembangkan unit usaha sehingga semakin lama BUMDES akan semakin tertinggal oleh keadaan masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa BUMDES Bina Usaha hanya menjalankan bisnis berskala lokal tanpa adanya pengembangan usaha lain atau melihat potensi-potensi lokal desa, peluang dan kesempatan pasar yang jangkauan cukup luas.

Selain itu, sosialisasi dan branding yang kurang dilakukan pihak BUMDES dalam memperkenalkan unit usahanya sehingga masyarakat lebih memilih bertransaksi pada tempat usaha yang lebih baik manajemen dan pelayanannya. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui fungsi sebenarnya adanya BUMDES. Meskipun pada wawancara sebelumnya dengan ketua BUMDES telah menyampaikan bahwa sudah dilakukan sosialisasi pada saat rapat ataupun pertemuan desa, agar dapat bertransaksi dengan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES namun sepertinya sosialisasi tersebut kurang masif apabila hanya dilakukan pada saat pertemuan desa saja.

Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurang maksimalnya usaha yang dilakukan oleh pengurus dalam pengelolaan BUMDES, yang seharusnya pihak pengurus BUMDES dapat meningkatkan dalam pengelolaannya dengan mengadakan sosialisasi tentang keberadaan dari BUMDES kepada masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui keberadaan

BUMDES. Pengurus juga harus dapat menarik perhatian sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat desa Sialang Dua Dahan, apalagi bagi masyarakat yang tinggal agak jauh keberadaannya dari keberadaan BUMDES Bina Usaha, sehingga kurangnya partisipasi dan keikutan serta masyarakat.

Kemudian menurut Ibramin dkk (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) faktor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta, Faktor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing.

Selain secara empiris juga didukung secara teori yaitu menurut Subehi (2018) adapun faktor mempengaruhi dalam pengelolaan BUMDes yaitu : sumber daya manusia pengelola, penggunaan teknologi, anggaran dana dari pemerintah dan adanya hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.

### 3. Emansipasi Lokal

Badan Usaha Milik Desa yang tumbuh dari emansipasi lokal (persamaan derajat secara lokal) jauh lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan dengan Badan Usaha yang lahir dari pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Desa yang lahir karena pemerintah daerah umumnya berjalan tidak sesuai angan-angan. Pandangan dari masyarakat sekitar adalah bahwa BUMDES adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek lain yang masuk kedesa. Sehingga kepercayaan dan daya lekat BUMDES kepada masyarakat sangat lemah.

Pandangan dan kepercayaan masyarakat yang lemah terhadap BUMDES tersebut menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam meramaikan BUMDES ataupun bertransaksi dengan

BUMDES. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat pada setiap organisasi usaha milik desa terkait besaran transaksi masyarakat terhadap BUMDES masih rendah.

Hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Arsyad menjelaskan bahwa *“penghambatnya ya itu kurang adanya kerjasama antarsesama pengurus dan kurangnya SDM dalam menjalankan usaha BUMDES menyebabkan terhambatnya perkembangan BUMDES, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi BUMDES sehingga masyarakat tidak memanfaatkan unit usaha yang ada di BUMDES”* (Wawancara Kepala Desa, Bapak Nasrun Arsyad, 27 Oktober 2023)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Jub Premi, selaku sekretaris desa, *“bahwa selama ini yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan BUMDES adalah SDM BUMDES yang kurang memadai, kurangnya dukungan masyarakat dalam transaksi di BUMDES, kurangnya promosi produk dari pihak BUMDES.”* (Wawancara Sekretaris Desa, Bapak Jub Premi, 27 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa emansipasi lokal terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BUMDES masih rendah disebabkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bertransaksi dengan unit usaha yang ada. Selain dari pada itu kurang baiknya manajemen unit usaha menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan transaksi. Unit usaha yang dibutuhkan masyarakat sering tutup dan jarang dibuka, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi pada BUMDES.

### 4. Kerjasama

Tidak adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antar Badan Usaha Milik Desa akan menghambat perkembangan BUMDES itu sendiri. Kerjasama yang dimaksudkan adalah kerjasama yang sifatnya internal dan eksternal. Artinya BUMDES harus

bekerjasama baik di dalam sesama pengurus atau pihak luar (eksternal) yang akan mendukung kemajuan BUMDES seperti pemerintah desa dan BUMDES desa lainnya yang lebih maju.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan BUMDES menjelaskan bahwa masih kurangnya kerjasama yang baik antar pengurus BUMDES maupun dengan pihak pemerintahan desa. Hal ini didukung oleh teoritis menurut Ibrahim (2019 : 351) keberhasilan pengelolaan BUMDes dipengaruhi adanya faktor-faktor tertentu yaitu : tersedia potensi sumber daya, anggaran yang dimiliki, sumber daya manusia pengelola, kerjasama dengan pihak lain dan komitmen pemerintah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putri Aryawati Widya Budi (2022) faktor pendukung manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri yaitu terdapat potensi desa, adanya bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam menjalankan BUMDES dan adanya komitmen dari pemerintah desa.

4. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak yaitu pihak pengurus, pemerintahan desa serta masyarakat desa akan menghasilkan kontribusi dan program-program usaha yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian lokal desa.

#### 5. Tradisi Berdesa

Dengan tidak adanya tradisi berdesa seperti tidak adanya tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong akan menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa. Tradisi berdesa yang selama ini melekat di masyarakat desa seperti yang telah disebutkan di atas sering ditinggalkan karena arus globalisasi yang menyebabkan hambatan akan perkembangan BUMDES semakin besar.

Perkembangan globalisasi dan teknologi menjadi salah satu penyebab hilangnya tradisi gotong royong didalam

masyarakat. Sikap gotong royong mendeskripsikan bahwa hidup bermasyarakat penuh dengan kekeluargaan, kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak menyimpulkan bahwa sudah berkurangnya sikap gotong royong dan kebersamaan didalam lingkungan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa hampir seluruh indikator yang menghambat terdapat pada BUMDES Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan, dan selanjutnya diharapkan BUMDES Bina Usaha dapat segera menanggulangi permasalahan yang dihadapi sehingga BUMDES Bina Usaha menjadi BUMDES yang berkembang dan maju.

Setelah melihat berbagai pemaparan mengenai faktor penghambat BUMDES Bina Usaha baik melalui wawancara dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dominan dalam menghambat perkembangan BUMDES Bina Usaha desa Sialang Dua Dahan, yaitu:

#### 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Kurang

Permasalahan manajemen pengelolaan unit usaha pada BUMDES menjadi masalah utama apabila jatuh ke tangan SDM yang masih kurang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas ataupun unit usaha yang dimiliki, hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta lapangan sebagai berikut:

##### a. Sebagian tenaga kerja BUMDES tidak mengenyam pendidikan yang tinggi.

Saat melakukan penelitian, peneliti melihat dan mengetahui bahwa sebagian pekerja di BUMDES Bina Usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi bahkan tidak menyelesaikan Sekolah Dasar sehingga menyebabkan kurang baiknya pengelolaan pada BUMDES itu sendiri.

##### b. Tenaga kerja di BUMDES Bina Usaha tidak menguasai teknologi dengan baik.

Fakta selanjutnya yang ditemukan di lapangan bahwa tenaga kerja pada

BUMDES Bina Usaha tidak menguasai teknologi dengan baik seperti pengoperasian komputer sehingga mengerjakan laporan ataupun tugas lainnya tidak maksimal,

c. Kurangnya ilmu pembukuan keuangan.

Selanjutnya tenaga kerja BUMDES tidak kompeten dalam melakukan pembukuan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian upah terhadap orang yang berada di luar BUMDES agar melakukan pembukuan keuangan. Tentunya apabila BUMDES Bina Usaha memiliki seseorang yang ahli dalam hal tersebut, tidak perlu memberikan upah kepada orang lain di luar kepengurusan BUMDES untuk melakukan pembukuan keuangan.

Hal di atas disebabkan karena kurangnya pelatihan dalam mengelola dan tidak memberikan tugas kepada seseorang yang ahli pada bidangnya. Kekurangan kemampuan SDM dalam mengelola unit usaha tentunya akan berdampak pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan BUMDES. Sehingga apabila pengelolaan BUMDES dilakukan dengan baik tentunya akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dan bertransaksi dengan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES.

Solusi dalam meningkatkan kecakapan pada pihak pengelola BUMDES ataupun karyawan unit usaha pada BUMDES yakni membuat program pelatihan untuk manajemen, pelatihan membuat laporan keuangan. Pelatihan BUMDES sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMDES adalah pilar utama roda BUMDES.

## 2. Kurangnya Kerja Sama dan Komunikasi Diantara Pemerintah Desa dan BUMDES Bina Usaha

Kurangnya kerjasama menjadi faktor penghambat yang dominan antara pemerintah desa dan pihak BUMDES. Hal ini terjadi dikarenakan di antara pemerintah desa dan pihak BUMDES sedikit tertutup dan kurang berkomunikasi sehingga kerjasama yang terjalin kurang maksimal.

Kurangnya komunikasi dan kerja sama ini dibuktikan pada saat pelaksanaan kegiatan audit lembaga BUMDES tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut dan selalu pihak desa yang mengikuti pelaksanaan audit tersebut, selain itu pihak BUMDES juga tidak ada melakukan laporan keuangan kepada pihak pemerintah desa setiap tahunnya.

Solusinya dalam meningkatkan kerjasama di antara pihak pemerintah desa dan pihak BUMDES adalah menjalin atau memperbaiki komunikasi adalah dengan mengadakan rapat pembahasan khusus mengenai strategi yang harus dilakukan agar unit usaha yang terbengkalai dapat hidup kembali dan unit usaha yang sudah berjalan menjadi lebih maksimal.

Selain memperbaiki kerjasama dengan pihak pemerintahan desa, tentunya organisasi BUMDES harus memperbaiki kondisi kerjasama internal pengurus BUMDES agar tetap solid dan memiliki keinginan untuk belajar serta memiliki visi untuk memajukan masyarakat sesuai dengan tujuan diadakannya BUMDES sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintahan Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sangat minim. Pemerintahan desa tidak melakukan pemanggilan dan tidak mengecek ada tidaknya laporan dari pihak BUMDES tentang anggaran yang dikelola oleh BUMDES, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol bagi pihak BUMDES Bina Usaha sehingga merasa tidak diawasi dan fungsi BUMDES tidak berjalan optimal.

Selain itu pemerintah desa juga tidak melakukan pemberian sanksi terhadap pihak BUMDES dan tidak memberikan ketegasan sehingga akhirnya BUMDES Bina Usaha berjalan di tempat tanpa adanya pengawasan pemerintah. Diharapkan setelah ini pemerintah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan agar BUMDES Bina Usaha dapat memajukan masyarakat desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat

Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil penelitian Meigawati (2018) menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes belum berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada masyarakat. Adapun faktor pendukungnya yaitu Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program BUMDes melalui kegiatan simpan pinjam.

Kemudian menurut hasil penelitian Iis Kurniasi, dkk (2024) menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Langgomali, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Faktor Pendukung yaitu : 1) Modal dan Dukungan Pemerintah. 2) Kerja Sama 3) Akses Yang Mudah. Sedangkan Faktor Penghambat yaitu: 1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat mengenai BUMDes dan Unit Usahanya. 2) Sarana dan Prasarana. 3) Minim Anggota. 4) Kurangnya Badan Pengelola.

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil penelitian menurut Putri Aryawati Widya Budi (2022) faktor pendukung dan penghambat manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri. Faktor Pendukung, yaitu terdapat potensi desa, adanya bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam menjalankan BUMDes, dan adanya komitmen dari pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu rendahnya sumber daya manusia pengelola dan minimnya anggaran pengelolaan BUMDes.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang sebelumnya telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis dapat

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDES merupakan lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. BUMDES Bina Usaha merupakan lembaga yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sialang Dua Dahan. BUMDES Bina Usaha memiliki tujuan untuk mensejahterahkan rakyat dalam program yang mereka laksanakan. Namun dalam pelaksanaannya mereka memiliki berbagai hambatan yang membuat beberapa bidang usaha tidak berjalan yakni unit usaha penyewaan molen dan penyewaan traktor. Hal tersebut terkendala dikarenakan banyak faktor yakni, tata kelola pengurus yang masih kurang memadai, kerjasama antara pengurus pengurus BUMDES dan pemerintahan desa yang masih kurang, emansipasi masyarakat akan BUMDES yang kurang sehingga membuat proses usaha di BUMDES tidak berjalan dengan baik serta SDM yang pengurus BUMDES yang belum kompeten.
2. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui yang menjadi faktor dominan dalam menghambat perkembangan BUMDES Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang, kurangnya kerja sama dan komunikasi di antara pemerintah desa dan BUMDES bina usaha, dan kurangnya pengawasan dari pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti simpulkan, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Sialang Dua Dahan harus memberikan pembinaan maupun pelatihan serta pengawasan yang maksimal terhadap pelaksana BUMDES Bina Usaha agar lebih mengenal potensi-potensi yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan program-program dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian.

2. Bagi pengelola BUMDES Bina Usaha perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan BUMDES agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana yang dilaksanakan oleh BUMDES Bina Usaha. Pengelola BUMDES Bina Usaha harus melakukan penguatan kemitraan atau peningkatan kerjasama yang baik dengan BUMDES atau lembaga ekonomi dari desa-desa lainnya yang di nilai sudah memiliki perkembangan yang lebih baik. Selain itu senantiasa memperbaiki hubungan dengan pemerintahan desa serta bertanggung jawab dan senantiasa belajar dalam melaksanakan tugas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angaraini, V. (2021). Evaluasi strategi pengembangan terhadap koperasi syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 124–133.
- Hasibuan, M.S.P. (2017) Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Bumi Aksara.
- Ibrahim, dkk (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 21 (3), 349-354
- Kurniasi, I., Kartomo, S., & Anggraini, Y. (2024). Faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Riset Ilmu Sosial 2024*, 345–352.
- Megawati, D. (2018), Implementasi Program BUMDES di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*. 3 (1), 1-12
- Pane, M. K. (2021). Klasifikasi data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penerimaan bantuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. *Jurnal Media Infotama*, 17 (1), 38-46
- Roni Jaya, M. R. (2018). Analisis hambatan dalam pengembangan BUMDes. *Jurnal El-Riyasah*, 9 (1), 22–34.
- Saepudin, E, Agustini, D.A. Agung, B. (2018). Partisipasi Masyarakat Ada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosiohumaniora*. 20 (1), 86-94.
- Subehi, F., et al. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pongkok Kabupaten Klaten. *Indonesian Journal of Anthropology*, 3(1), 34-42.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Alfabeta.
- Prasetyo, C. A., Kustiawan, & Nazaki. (2021). Faktor-faktor penghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Layar Bertuah Desa Kelong. *Jurnal Pengembangan Desa*, 2(2), 833–842.
- Widya Budi, P. A., Hariani, D., & Augustin, R. H. (2022). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya memulihkan pendapatan asli desa (PADes) di era new normal: Studi kasus BUMDes Tirta Mandiri

Desa Ponggok Kecamatan  
Polanharjo Kabupaten Klaten.  
*Jurnal Universitas Diponegoro. 2*  
*(1), 1-15*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2015 mengatur  
tentang pendirian, pengurusan,  
pengelolaan, dan pembubaran  
Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDES)

Undang-Undang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Desa Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  
22 Tahun 2017 tentang Penetapan  
Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Tahun 2017